PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Rizki Dita Aprilia
125020101111008

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Rizki Dita Aprilia
NIM	:	125020101111008
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 Agustus 2016.

Malang, 04 Agustus 2016
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS
NIP. 19520415 197412 1 001

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013)

Rizki Dita Aprilia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
arizkidita@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang stategis dan komprehensif sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karenanya studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang mencakup 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama kurun waktu enam tahun dengan bantuan program SPSS 17.0. Data yang diperoleh berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimu, pendidikan, sedangkan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses dimana adanya perubahan yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Dengan kata lain, pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus dari kondisi yang sebelumnya tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi.

Di negara-negara berkembang khususnya Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang pelik yang tidak pernah ada hentinya yang telah dirasakan masyarakat sejak lama. Banyaknya jumlah penduduk dan tidak meratanya pembangunan, kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan yang dapat mengakibatkan banyaknya pengangguran yang terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena disebabkan rendahnya pendidikan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah kemiskinan di negara-negara berkembang, dan sampai saat ini masalah kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya teratasi.

Dalam arti luas, Chambers (dalam Suryawati, 2005), mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Gambar 1 : Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2008-2013 (persen)

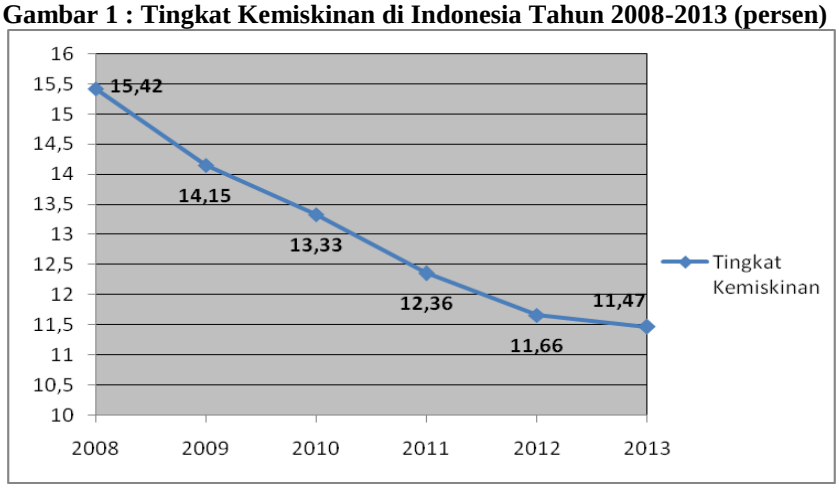

Sumber : BPS, Jawa Timur Dalam Angka, berbagai Tahun Terbitan

Gambar 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2008 hingga tahun 2013 terus mengalami penurunan. Periode tahun 2008 tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada tahun-tahun setelahnya, yakni sebesar 15,42 persen. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 14,15 persen, dan pada tahun 2010 turun kembali sebesar 13,33 persen, tahun 2011 turun kembali sebesar 12,36 persen dan pada tahun 2012 dan 2013 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 11,66 persen menjadi 11,47 persen di tahun 2013.

Penurunan angka tingkat kemiskinan di Indonesia juga tidak terlepas dari usaha kerja keras pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Walaupun belum bisa dikatakan maksimal, tetapi angka penurunan ini memebrikan efek positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Gambar 2 : Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2008-2013 (persen)

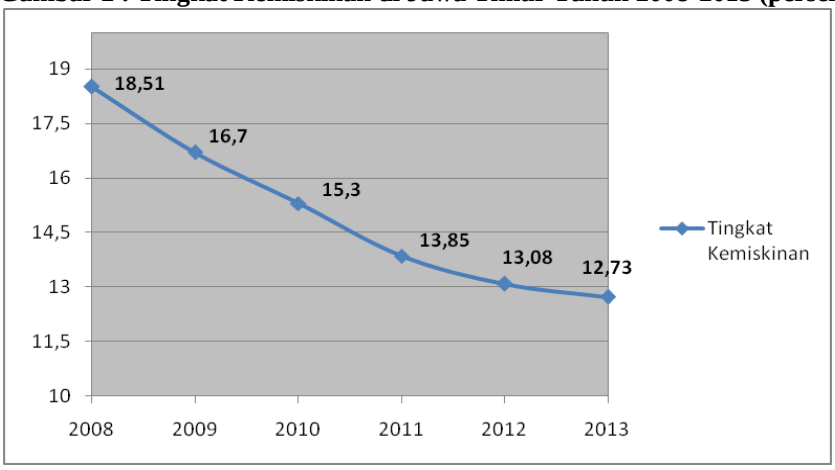

Sumber : BPS, Jawa Timur, Data dan Informasi Kemiskinan

Usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan merupakan usaha yang sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat Indonesia, bahkan penanggulangan masalah kemiskinan merupakan salah satu program prioritas termasuk pula bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, maka hasil memperlihatkan adanya pengaruh positif dimana hal ini terlihat pada gambar 2 yang menunjukkan bahwa angka tingkat kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar 18,51 persen dan mulai mengalami penurunan sebesar 16,7 persen pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 15,3 persen di tahun 2010, tahun 2011 tingkat kemiskinan turun kembali sebesar 13,85 persen dan di tahun 2012 dan 2013 tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan kembali, yakni sebesar 13,08 persen dan 12,73 persen. Namun keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi

masalah kemiskinan belum sepenuhnya teratasi, ini terlihat dari tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih relatif tinggi, yaitu diatas 10 persen.

Gambar 3 : Rata-rata Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2008-2013 (persen)

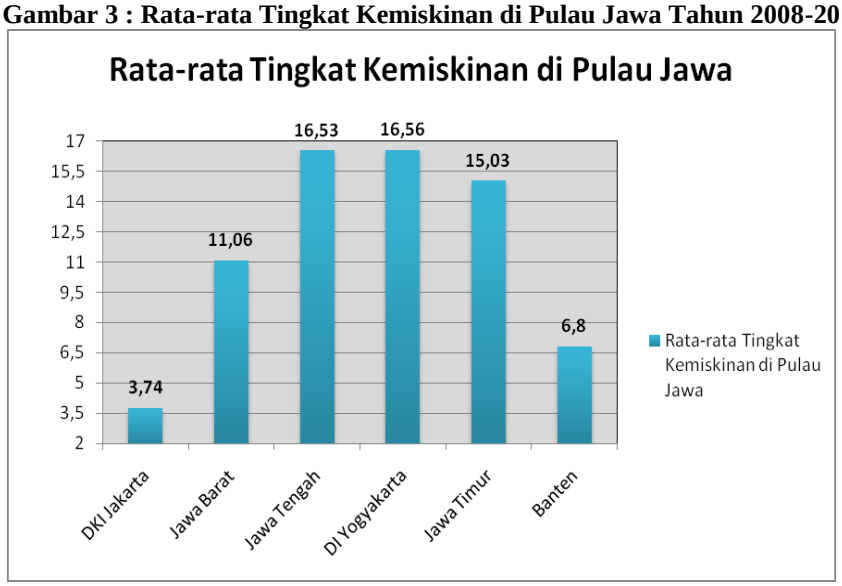

Sumber : BPS, Statistik Indonesia, berbagai Tahun Terbitan

Pada gambar 3 menunjukkan adanya rata-rata tingkat kemiskinan di enam provinsi yang ada di pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Timur masih tinggi diatas 10 persen dan menduduki pada peringkat ke tiga sebesar 15,03 persen. Peringkat pertama ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta sengan rata-rata tingkat kemiskinann sebesar 16,56 persen, peringkat ke dua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,53 persen. Peringkat ke empat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 11,06 persen, peringkat ke lima ditempati oleh provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 6,80 persen dan yang terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 3,74 persen. Dalam gambar 3 juga dapat dilihat bahwa hanya ada dua provinsi yang hanya memiliki angka rata-rata tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

Tabel 1 : Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Rata-rata Tingkat Kemiskinan Tahun 2008-2013

Rata-Rata Tingkat Kemiskinan	Jumlah Kabupaten/Kota
0% - 10%	9
11% - 20%	24
21% - 30%	4
31% - 40%	1

Sumber : Data diolah

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur masih tidak merata dan sebagian besar tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi. Ada 1 kabupaten dan 8 kota yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan dibawah 10 persen, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki rata-rata tingkat kemiskinan diatas 10 persen (1 Kota dan 28 Kabupaten). Ini mengindikasikan usaha

pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih belum merata ke seluruh kabupaten/kota khususnya di Jawa Timur.

Gambar 4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2008-2013 (persen)

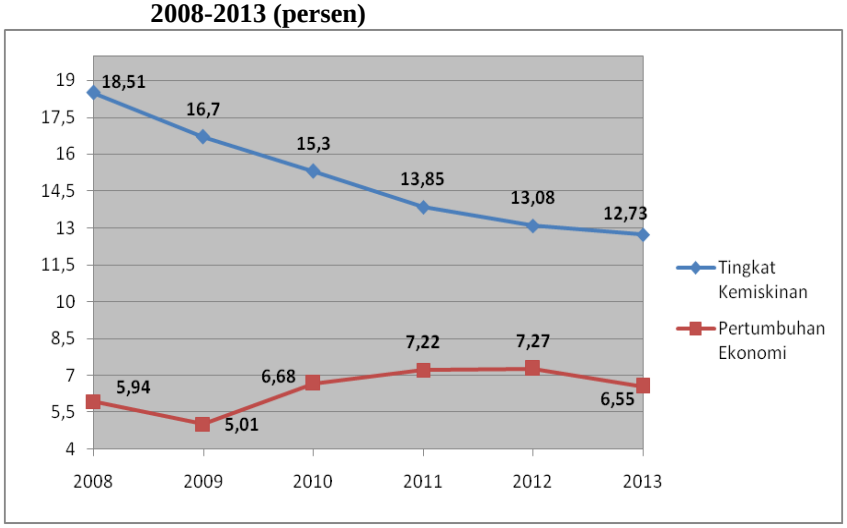

Sumber : BPS Statistik Indonesia, berbagai Tahun Terbitan

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dari 5,94 persen di tahun 2008 menjadi 5,01 persen di tahun 2009 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga 2012, yakni sebesar 6,68 persen ditahun 2010, di tahun 2011 sebesar 7,22 persen, di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,27 persen, namun pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 6,55 persen. Dengan adanya data yang memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami fluktuasi, namun terlihat juga pada gambar 1.3 bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur memiliki kecenderungan penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun, yakni 18,51 persen di tahun 2008 dan turun menjadi 16,7 persen di tahun 2009 dan mengalami penurunan terus-menerus hingga tahun 2013, dimana di tahun 2010 turun menjadi 15,3 persen, di tahun 2011 turun menjadi 13,85 persen, di tahun 2012 dan 2013 turun kembali sebesar 13,08 persen dan 12,73 persen.

Tabel 2 : Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013 (rupiah)

Tahun	UMP
2008	632.953
2009	741.016
2010	796.903
2011	863.334
2012	933.120
2013	1.139.730

Sumber : Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

Menurut Simanjuntak (1985), setiap kenaikan upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah, maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 tingkat upah minimum Provinsi, khususnya di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2008 tingkat upah minimum sebesar 632.953 rupiah, kemudian naik menjadi 741.016 rupiah di tahun 2009. Di tahun 2010 upah minimum mengalami peningkatan sebesar 796.903 rupiah, di tahun 2011 meningkat sebesar 863.334 rupiah, di tahun 2012 meningkat sebesar 933.120 rupiah dan kenaikan upah minimum tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 1.139.730 rupiah.

Selain itu faktor yang juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2004).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005).

Akses masyarakat tehadap fasilitas-fasilitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) SD/MI pada tahun 2008 memiliki APK sebesar 116,56 % dan pada tahun 2013 terjadi penurunan angka partisipasi kasar (APK) sebesar 112,70 %, SMP/MTS memiliki APK sebesar 96,18 % di tahun 2008 dan meningkat sebesar 102,22 % di tahun 2013, SMA/MA/SMK/MAK memiliki APK 64,28 % di tahun 2008 dan di tahun 2013 meningkat menjadi 78,21 % (Bappeda Jatim, 2015).

Gambar 5 : Tingkat Pengangguran di Jawa Timur Tahun 2008-2013 (persen)

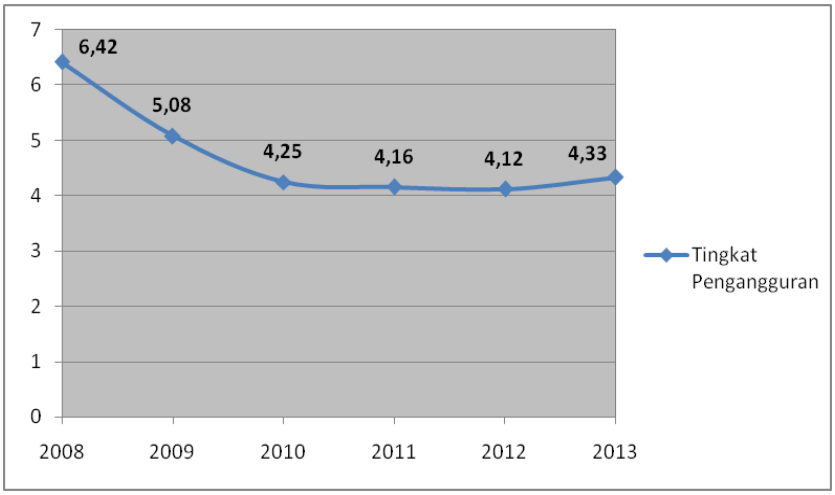

Sumber : BPS, Jawa Timur Dalam Angka, berbagai Tahun Terbitan

Salah satu unsur yang dapat menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain, yaitu kemiskinan (Sadono Sukirno, 2003).

Pada gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun. Pada grafik terlihat bahwa di tahun 2008 dan 2009 tingkat pengangguran masih di atas 5 persen. Pada tahun 2008 tingkat pengangguran sebesar 6,42 persen, di tahun 2009 terjadi penurunan pada angka tingkat pengangguran sebesar 5,08 persen. Di tahun-tahun berikutnya tingkat pengangguran di Jawa Timur mulai memperlihatkan penurunan di bawah 5 persen. Tahun 2010 tingkat pengangguran sebesar 4,25 persen, di tahun 2011 sebesar 4,16 persen dan di tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi 4,12 persen dan di tahun 2013 tingkat pengangguran mengalami kenaikan sebesar 4,33 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas, di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2008-2013 terjadi fenomena penurunan pada tingkat kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi, yaitu diatas 10 persen. Selain itu, rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke tiga dan masih relatif tinggi diatas 10 persen. Belum meratanya hasil usaha

pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangatlah buruk terhadap perekonomian di suatu wilayah/negara. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (GRO), Upah Minimum (WAG), Pendidikan (EDUC), dan tingkat pengangguran (UN) terhadap Tingkat Kemiskinan (POV) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013".

B. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Kemiskinan

Secara umum pengertian kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat. Selain dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat, kemiskinan juga dapat dilihat secara luas dari sudut pandang baik dari segi sosial maupun budaya dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sering di hadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan papan, sandang, dan pangan. Fenomena kemiskinan seperti ini sudah biasa terjadi di negara berkembang khususnya di Indonesia, dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo, 1982). Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk di daerah pedesaan, dan 480 kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sajogyo, 1982).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004). Menurut Tarigan (2004), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, dan Thomas Robert Malthus maupun ekonom neoklasik, Robert Solow dan Trevor Swan mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai dari perekonomian yang bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana hasil produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju pada perekonomian modern yang di dominasi oleh sektor-sektor industri manufaktur. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Dalam hal ini, kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para wiraswasta (*entrepreneur*).

Upah

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Peraturan Menteri tersebut juga menetapkan upah minimum sektoral (UMS) pada tingkat provinsi harus lebih besar atau tinggi sedikitnya mencapai 5% dari standar upah minimum yang telah ditetapkan untuk tingkat provinsi. Selain itu, upah minimum sektoral (UMS) di tingkat kabupaten/kota juga harus lebih tinggi 5% dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Sebagai

imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sumarsono, 2003).

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1999), faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah sebagai berikut:

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

   Faktor ini berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran, dimana untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (*skill*) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan yang mempunyai "Penawaran" yang melimpah, maka upah akan cenderung menurun.
2. Organisasi Buruh

   Ada tidaknya organisasi buruh, serta kuat lemahnya organisasi buruh yang ada dalam suatu perusahaan akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah.
3. Kemampuan untuk Membayar

   Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Jika kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas karyawan.
4. Produktivitas

   Upah insentif sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula upah yang ia terima. Prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai produktivitas.
5. Biaya Hidup

   Faktor lain yang perlu diperhatikan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi. Bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan "batas penerimaan upah" dari para karyawan.
6. Pemerintah

   Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan dibayarkan.

Tujuan adanya penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yanglayak bagi para pekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat. Sampai saat ini pun penetapan konsep upah minimum terkadang masih disalah gunakan oleh beberapa perusahaan atau pengusaha tertentu. Semisal, pengusaha hanya menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum provinsi yang ada tanpa melihat masa kerja pekerja itu. Selain itu, seringkali pekerja yang telah memiliki masa kerja yang lama pun upahnya hanya selisih sedikit lebih besar dari upah pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.

Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jalur pendidikan adalah dimana jalur yang harus dilalui peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya di dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Di dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1, dinyatakan bahwa jalur dalam pendidikan terdiri dari tiga jalur pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1) Pendidikan Formal

   Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenjang pada pendidikan formal:

   a. Pendidikan Dasar

      Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat.

   b. Pendidikan Menengah

      Pendidikan Menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari dua pendidikan, yaitu pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah pertama adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan pendidikan menengah atas adalah SMA (Sekolah Mengah Atas) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

   c. Pendidikan Tinggi

      Pendidikan Tinggi merupakan jenjang lanjutan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

2) Pendidikan Non-Formal

   Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya.

3) Pendidikan Informal

   Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir dalam *World Commision on Environmental and Development*, 1997 dalam MacKeown (dalam Dias Satria, 2008), bahwa *sustainable development* adalah: *"Sustainable Development is development that meets the needs of the present without comprimising the ability of future generations to meet their own needs."* Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (*greener development*) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai.

Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 1999).

Menurut Mankiw (2006), pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan psikologis. Jadi tidaklah

mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003). Sedangkan menganggur dibagi menjadi dalam dua kelompok, yaitu: (1) setengah menganggur kentara (*visible unemployment*), yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan (2) setengah menganggur tidak kentara (*invisible unemployment*), yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah (Simanjuntak, 1985).

Adapun faktor-fakor yang menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya adalah: (1) jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia (kesenjangan antara penawaran dan permintaan); (2) kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja; (3) masih adanya anak putus sekolah dan lulus yang tidak terserap di dunia kerja dan berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai; (4) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global. Dari keempat faktor-faktor tersebut, faktor pertama, kedua, ketiga merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dari gambaran diatas, maka perlu dikembangkan program-program khusus dan pelatihan dalam rangka mempercepat penurunan angka pengangguran (Disnakertrans, 2009).

Dampak pengangguran yang sering di alami oleh negara berkembang dan negara miskin dapat dilihat dari segi ekonomi dan segi lingkungan sosial.

Dampak Pengangguran dari Segi Ekonomi:

1. Jumlah pengangguran yang tinggi dapat menurunkan jumlah tabungan negara.
2. Pengangguran dapat mempengaruhi kemampuan berinvestasi
3. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat di suatu negara
4. Pengangguran yang tinggi dpa mengurangi pendapatan nasional dan pendapatan perkapita
5. Dapat mengakobatkan kelesuan di dalam bidang usaha karena barang dan jasa kurang terserap oleh pasar

Dampak Pengangguran dari Segi Lingkungan Sosial:

1. Pengangguran dapat menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat karena adanya tingkat kriminalitas yang tinggi
2. Pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan
3. Pengangguran dapat meningkatkan kawasan kumuh dan lingkungan hidup yang kurang sehat
4. Meningkatkan kegiatan ekonomi yang terlarang (ilegal)
5. Dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan munculnya pengamen, anak jalanan serta tingginya anak-anak putus sekolah

Pengangguran dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan gratis bagi siswa/siswi yang kurang mampu
2. Pemerintah harus dapat menyediakan tempat-tempat peletihan-pelatihan, semisal pelatihan keterampilan
3. Menyediakan lembaga bantuan kredit atau memberikan kredit masyarakat yang kurang mampu
4. Pemerintah memberdayakan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
5. Pemerintah harus dapat mensosialisasikan keluarga bencana
6. Pemberian informasi yang cepat mengenai adanya lowongan pekerjaan

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain:

1. Adit Agus (2010) dalam jurnal "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskian (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)". Variabel yang digunakan Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran.
2. Arius Jonaidi (2012) dalam jurnal "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia)". Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y_1), Kemiskinan (Y_2), Pengangguran, Investasi, Harapan Hidup, Melek Huruf, Pendidikan.

3. Lailatul Istifaiyah (2015) dalam jurnal "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013)". Variabel yang digunakan adalah Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pengangguran terbuka (TPT).
4. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin". Variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin, PDRB, Jumlah Penduduk, Pangsa Sektor Pertanian, Pangsa Sektor Industri, Inflasi, Jumlah Lulusan SMP dan SMA, Dumy Krisis Ekonomi.
5. Wongdesmiwati (2009) dalam jurnal "Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika". Variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Indonesia per tahun, PDB yang mengaggambarkan pertumbuhan ekonomi, Angka Harapan Hidup, Persentase Angka Melek Huruf, Persentase Penggunaan Listrik, Persentase Konsumsi Makanan.

Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab suatu permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Hipotesis masih harus di uji terlebih dahulu karena hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2013.
2. Diduga variabel upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2013.
3. Diduga variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2013.
4. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2013.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan berbagai bentuk angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto, 2006), bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut. Penelitian ini dilakukan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan pengangguran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen dala penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, pengangguran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi data panel. Selain melaukan analisis regresi linier berganda digunakan pula uji signifikansi yang terdiri dari uji t dan uji F serta melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dar uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas yang menggunakan bantuan program SPSS 17.0. Sehingga model fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 WAG_{it} + \beta_3 EDUC_{it} + \beta_4 UN_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

POV = Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur
GRO = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur
WAG = Upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur
EDUC = Pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur
UN = Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur
α = Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel bebas
μ_{it} = Komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i
i = 1, 2, 3, ..., 38 (data *cross-section* kabupaten/kota di Jawa Timur)

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (data *time-series*, tahun 2008-2013)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 : Koefisien Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.69320	2.993831		6.912	.000
	Pertumbuhan_Ekonomi	-.99819	.451722	-.132	-2.210	.028
	Upah_Minimum	-.00001	.000002	-.153	-2.202	.029
	Tingkat_Pendidikan	-.00001	.000003	-.180	-2.746	.007
	Tingkat_Pengangguran	1.21338	.144524	.462	8.396	.000

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Sumber : Data diolah, 2016

Dari hasil output persamaan regresi tersebut di dapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 WAG_{it} + \beta_3 EDUC_{it} + \beta_4 UN_{it} + \mu_{it}$$

$$POV = 20.69320 - 0.99819\ GRO - 0.00001\ WAG - 0.00001\ EDUC + 1.21338\ UN$$

Hasil dari persamaan regresi linier berganda tersebut memberikan pengertian sebagi berikut :

1. β_1 memiliki nilai sebesar – 0.99819, artinya jika ada kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.99819 persen.
2. β_2 memiliki nilai sebesar – 0.00001, artinya bahwa dengan adanya kenaikan pendidikan sebesar 1 jiwa. Maka akan menyebabkan adanya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.00001 persen.
3. β_3 memiliki nilai sebesar – 0.00001, artinya bahwa ketika terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar – 0.00001 persen.
4. β_4 memiliki nilai sebesar 1.21338, artinya bahwa ketika terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1.21338 persen.

Uji Signifikansi (Uji t)

Uji signifikansi secara parsial (uji t) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2, dimana dengan tingkat toleransi kesalahan (α) sebesar 0,05 atau 5% menunjukkan hasil bahwa keempat variabel bebas (*independent variabel*), yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependent variabel), yaitu Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0.028 yang artinya nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari 0.05 atau 5%.

Variabel upah minimum dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi dari upah minimum sebesar 0.029 yang artinya nilai signifikansi upah minimum lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Variabel pendidikan dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi pendidikan sebesar 0,007 yang artinya nilai signifikansi pendidikan lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Variabel tingkat pengangguran dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut

dikarenakan nilai signifikansi dari tingkat pengagguran sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi tingkat pengangguran lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan, yaitu menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dimana untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat jika antara variabel bebas terjadi korelasi satu dengan lainnya atau berkorelasi tetapi tidak lebih tinggi dari nilai R^2, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya multikolinearitas. Selain itu, ada cara lain untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, yaitu dengan cara melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Ketentuannya adalah apabila nilai VIF dari satu variabel melebihi 10,00 berarti terdapat multikolinearitas.

Tabel 3 : Uji Asumsi Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pertumbuhan_Ekonomi	.981	1.019
	Upah_Minimum	.985	1.015
	Tingkat_Pendidikan	.994	1.006
	Tingkat_Pengangguran	.996	1.004

a. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Sumber: Data diolah, 2016

Dalam tabel 3 diatas, dapat dilihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10,00 atau nilai *tolerance* tidak nol, maka tidak terjadi adanya multikolinearitas atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi antara variabel bebas yang ada.

Uji Autokorelasi

Analisis statistik autokorelasi pada dasarnya adalah untuk menguji apakah pada sebuah model regresi linear berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumya (t-1). Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (D-W) untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yang dapat dilihat pada tabel 4.. Secara umum patokan atau ketentuan terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

1. Apabila angka D-W dibawah -2 menunjukkan adanya autokorelasi positif.
2. Apabila angka D-W di antara -2 sampai +2 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.
3. Apabila angka D-W di atas +2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

Tabel 4 : Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	Durbin-Watson
1	1.974[a]

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Pengangguran, Upah_Minimum, Tingkat_Pendidikan, Pertumbuhan_Ekonomi

b. Dependent Variable: Tingkat_Kemiskinan

Sumber : Data diolah, 2016

Pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa hasil nilai uji Durbin-Watson (D-W) adalah 1,974 , maka dapat dikatakan nilai 1,974 berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara faktor pengganggu dan masing-masing variabel bebas atau untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2005).

Tabel 5 : Uji Heteroskedastisitas

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.576[a]	.332	.308	.22122

a. Predictors: (Constant), X4 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kuadrat, X3, X4, X1, X3 kuadrat, X2

b. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji white dapat dilihat pada tabel 5. Dimana dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai χ^2 = n x R^2 (228 x 0,332 = 75,696). Nilai dari χ^2, yaitu sebesar 75,969 sedangkan nilai χ^2 tabel dengan derajat kebebasan K-1 = 5-1 = 4 dan α = 0,05 di dapat nilai 9,487. Dengan hasil tersebut maka dapat dilihat χ^2 hitung lebih besar (>) dari hasil tabel χ^2, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2013 dapat dimasukkan ke dalam sebuah model sebagai berikut :

$$POV_{it} = \alpha + \beta_1 GRO_{it} + \beta_2 WAG_{it} + \beta_3 EDUC_{it} + \beta_4 UN_{it} + \mu_{it}$$

$$POV = 20.69320 - 0.99819\ GRO - 0.00001\ WAG - 0.00001\ EDUC + 1.21338\ UN$$

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

Dari hasil regresi, diperoleh hasil bahwa koefisien dari pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar - 0.99819 dan signifikan secara statistik. Artinya, bahwa adanya kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan penurunan pada tingkat kemiskinan sebesar 0.99819 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan *necessary condition* bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Artinya, bahwa pertumbuhan tersebut haruslah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Selain itu, pertumbuhan juga perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja, yaitu salah satunya pada sektor yang padat karya atau sektor pertanian. Dari hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin, sehingga efektif dalam menurunkan angka tingkat kemiskinan, ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008), dimana hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), yang menggunakan PDB sebagai suatu ukuran pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Pengaruh Upah Minimum (U) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

Dari hasil regresi ditemukan bahwa upah minimum memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan koefisien sebesar - 0.00001. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan upah minimum sebesar 1 rupiah, maka dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.00001 persen. Semakin tinggi upah minimum dapat memicu penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan oleh Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mempu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa pendidikan yang diukur menggunakan jumlah lulusan SMA keatas kabupaten/kota di Jawa Timur memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan koefisien sebesar - 0.00001. Kenaikan pendidikan sebesar 1 jiwa akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.00001 persen. Hal ini juga sesuai teori pertumbuhan baru dengan menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian serta pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Taraf pendidikan yang rendah yang tercermin dari lama pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki, sehingga kemiskinan tetap merajalela. Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusianya menjadi rendah yang menyebabkan produktivitas rendah, sehingga penghasilan yang mereka dapat rendah (Jonaidi, 2012).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Siregar dan Wahyuniarti (2008), dimana menggunakan jumlah lulusan SMP, jumlah lulusan SMA dan jumlah lulusan diploma sebagai ukuran pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009), dimana dalam penelitiannya menggunakan angka melek huruf sebagai ukuran pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesis penelitian dapat diterima.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan koefisien sebesar 1.21338. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen akan menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan sebesar 1.21338 persen. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan memicu adanya peningkatan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Agus (2010), bahwa kenaikan 1 persen pada tingkat pengangguran dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah yang dapat memicu adanya kenaikan angka kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Istifaiyah (2015), bahwa dengan setiap bertambahnya jumlah pengangguran sebesar 1 persen, maka dapat menyebabkan pendapatan rendah bahkan tidak memiliki pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Pengangguran juga dapat terjadi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau yang sering disebut sebagai PHK, sehingga menyebabkan pekerja tidak memiliki pendapatan dan rentan hidup dibawah garis kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, maka hipotesisi penelitian dapat diterima.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2013. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Karena kemajuan suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Apabila suatu daerah atau wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.
2. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat. Hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan.
3. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan melakukan investasi pendidikan secara bertahap, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, maka dapat mendorong produktivitas kerja seseorang dikarenakan memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi.
4. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tehadap tingkat kemiskinan. Pengangguran dapat terjadi dikarenakan adanyan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan kepada para karyawannya, sehingga menyebabkan pekerja tersebut tidak memiliki pendapatan dan rentan hdup dibawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu terjadinya kenaikan angka kemiskinan begitu pula sebaliknya.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, di dapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga ke depannya dapat dilaksanakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dilaksanakan pemerataan pembangunan yang berorientasi keseluruh golongan masyarakat termasuk masyarakat miskin, serta dilakukan adanya upaya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah/wilayah dengan mengandalkan potensi-potensi yang dimiliki di suatu daerah/wilayah tersebut.
2. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upah paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM) atau kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi para pekerja, Diharapkan dengan adanya upah minimum, seorang pekerja menerima upah sesuai standar kebutuhan hidup minimum dan kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan.
3. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kewajiban wajib belajar 9 tahun hendaknya ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun agar semua mendapat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Selain itu, pemerintah harus lebih berupaya lagi dalam memberikan jaminan pendidikan terutama bagi orang miskin serta meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan secara merata tidak hanya terpusat di suatu daerah tetapi juga ke seluruh daerah khususnya yang ada di Jawa Timur.
4. Tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat pengangguran juga harus diturunkan, salah satunya dengan mempermudah ijin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat bersaing di dunia kerja, salah satunya dengan meningkatkan kewirausahaan yang dibekali

pelatihan secara khusus dan meningkatkan bidang pendidikan, sehingga keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur. 2015. *Buku Data Dinamis Semester 1 2015: Dukungan Provinsi Jawa Timur Dalam Pemberantasan Kemiskinan*. http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2015/09/dinamis_sem_1_2015.pdf diakses 10 Desember 2015.

BPS, Statistik Indonesia. 2015. Data *dan Informasi Kemiskinan Di Indonesia*. http://www.bps.go.id/ diakses pada 20 Desember 2015.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Berbagai Tahun Terbitan. *Data Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jatim.

BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008-2013 Jawa Timur. 2013. *Penduduk usia 15 tahun ke atas yang Tamat SMA keatas menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013 (jiwa)*. http://www.bps-jatim.go.id/ diakses pada 4 Januari 2016.

BPS, Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja di Jatim Tahun 2008-2013. 2013. *TPT Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. http://www.bps-jatim.go.id/ diakses pada 4 Januari 2016.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Berbagai Tahun Terbitan. *Data Dan Informasi Kemiskinan Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jatim.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Berbagai Tahun Terbitan. *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: BPS Jatim.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Berita Resmi Statistik Jawa Timur*. http://www.bps-jatim.go.id/ diakses pada 4 Januari 2016.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan. Berbagai Tahun Terbitan. *Perkembangan Besaran UMK Provinsi Jawa Timur Tahun 1992 S/D 2015*.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies.

Rachman, Hasanuddin. (2005). *Pengaruh Pengupahan Sebagai Langkah Stategis Stabilitas Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ranupandjojo, Heidjrachman & Suad Husnan. 1999. *Manajemen Personalia*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.

Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Satria, Dias. 2008. *Modal Manusia Dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan*. http://www.diassatria.web.id/wp-content/uploads/2008/12/jurnal-indef-subsidi.pdf diakses pada 10 Desember 2015.

Simanjuntak, Payman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.

Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2004. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Jember: Penerbit Graha Ilmu.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: aris Munandar. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.